

Efektivitas Sistem Informasi Pelaporan Monitoring Dan Evaluasi (E-Controlling) Pada Bagian Evaluasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang

Nur Ahsani Maghfiroh

Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara
Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

Abstract: This study aims to analyze The Effectiveness of The Reporting Monitoring and Evaluation System Information (e-Controlling) on The Development Evaluation Section in The Secretariat of Bontang City Government and to analyze the enabling and preventing factors of The Effectiveness of The Reporting Monitoring and Evaluation System Information (e-Controlling) on The Development Evaluation Section in The Secretariat of Bontang City Government. In this study the author uses descriptive research with qualitative analysis method. The results of this research shows that the Application or The Reporting Monitoring and Evaluation System Information (e-Controlling) has been well implemented as it has loaded the stages in the reporting that makes it easier to implement and present the accountable and real time monitoring and evaluation reports.

Keywords : Effectiveness, Reporting, Monitoring and Evaluation System Information

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e-Controlling) pada Bagian Evaluasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang dan yang kedua adalah untuk menganalisis faktor Pendukung dan penghambat dalam Efektivitas Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e-Controlling) pada Bagian Evaluasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Aplikasi atau Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e-Controlling) telah dilaksanakan secara baik hal ini ditandai dengan Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e-Controlling) yang digunakan telah memuat tahapan-tahapan dalam pelaporan sehingga memudahkan dalam mengimplementasikan dan menyajikan laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan bersifat real time.

Kata Kunci: Efektivitas, Sistem Informasi Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dimana pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama serta merupakan konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara

Saat ini suatu instansi dituntut untuk dapat bekerja dengan cepat, tepat dan benar dengan tingkat ketelitian yang tinggi agar dapat terus berjalan dengan hasil yang transparan dan akuntabel. Sistem informasi yang dibutuhkan juga harus akurat, tepat waktu, dan fleksibel. Hal ini akan menunjang kelancaran aktivitas di instansi dalam kegiatan sehari-harinya.

Dengan melihat kebutuhan akan ketepatan dan fleksibilitas diatas, diperlukan sarana yang dapat meringankan tugas seorang pemimpin, terutama pada bagian perencanaan dan keuangan dalam menyelesaikan suatu permasalahan terutama masalah pengolahan data *monitoring* dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Hal tersebut diatas sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sistem Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, khususnya terhadap program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, perlu terus dikembangkan agar lebih bermanfaat bagi manajemen pembangunan. Penyempurnaan mekanisme pelaporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan secara langsung mengharuskan terpenuhinya dokumen perencanaan yang berkualitas sehingga dapat dievaluasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 10 yang kemudian menjadi dasar dibentuknya Bagian Evaluasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang melalui Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan. Tugas Pokok dan fungsi diuraikan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 11 Tahun 2015.

Salah satu alternatif yang dapat membantu hal tersebut adalah dengan menerapkan sistem informasi dalam suatu instansi untuk mengolah data dalam rangka pelaporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Dengan sistem informasi diharapkan dapat diperoleh data secara tepat waktu, akurat, relevan, lengkap dan lebih efisien waktu, tenaga dan biaya.

Efektivitas Organisasi Dalam Pengawasan Pembangunan Daerah

Apabila seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah di tetapkan pula (Siagian, 2005).

Kemudian Streers (2005) mengemukakan ada empat faktor yang mempengaruhi dalam mengukur efektivitas organisasi yaitu : (1) Karakteristik organisasi terdiri dari struktur organisasi dan teknologi struktur adalah cara organisasi untuk menyusun orang-orang untuk menciptakan sebuah organisasi, (2) Karakteristik lingkungan mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal yaitu semua

lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-batasan organisasi. Lingkungan internal pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut-atribut lingkungan saja, (3) Karakteristik lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa keterkaitan pada organisasi dan prestasi kerja. (4) Kebijakan dan praktek manajemen dibutuhkan suatu organisasi untuk mewujudkan suatu keberhasilan melalui perencanaan, koordinasi, sehingga dapat memperlancar kegiatan yang dituju kearah sasaran.

Pengertian Efektivitas Ukuran Efektivitas

Siagian (2001) berpendapat bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas adalah seberapa besar tingkat keberhasilan output yang dicapai dari output yang di harapkan melalui sejumlah input yang dilakukan. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan yang efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2008) yaitu: (1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. (2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan. (3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. (4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. (5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat. (6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. (7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien. (8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (e-Controlling)

Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling bekerjasama, yang digunakan untuk mencatat data, mengolah data, dan menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan agar dapat membuat keputusan yang dengan baik (Winarno, 2006).

Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menghimpun, menganalisis dan menyusun pelaporan hasil evaluasi dan monitoring realisasi kegiatan SKPD serta

mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi atau ada indikasi bermasalah dalam pelaksanaannya. Data tersebut digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta merumuskan pemecahan masalah terhadap hasil pelaksanaan pembangunan.

Efektivitas Sistem Informasi Pelaporan Monitoring Dan Evaluasi (E-Controlling) Pada Bagian Evaluasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang

Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu disini dapat diartikan sebagai ketepatan waktu dalam penyajian laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap bulan yang akan terakumulasi menjadi laporan per triwulan, semesteran dan laporan akhir tahun dari masing-masing SKPD. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang disajikan tersebut memuat data realisasi keuangan, fisik, data paket pekerjaan dan indikasi permasalahan yang ada.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa pelaporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan masih terkendala waktu. Hal ini dikarenakan berbagai syarat administrasi untuk seluruh SKPD untuk dapat melakukan proses pengentrian/penginputan data realisasi fisik dan keuangan yaitu berupa proses merekap menjadi laporan bulanan yang membutuhkan waktu yang lebih dalam menyiapkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) membutuhkan data pendukung sebagai lampiran, baik itu hasil pengamatan dilapangan maupun berkas pendukung lainnya.

Selain beberapa hal diatas, maka dapat dilihat bahwa secara sederhana Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) tidak dapat dilakukan pengisian/entry data jika dalam keadaan *server down* yang diakibatkan oleh aliran listrik yang padam atau tidak ada koneksi terhadap internet.

Menurut Jogiyanto (1993) salah satu pilar kualitas informasi adalah tepat pada waktunya. Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat, maka akan dapat berakibat fatal bagi organisasi.

Akurasi dan Relevansi Data

Dalam Sistem Informasi Manajemen, kendali dapat berupa akurasi dan relevansi dari masukan, akurasi dan relevansi dari proses, maupun akurasi dan relevansi dari keluaran yang dapat dirancang dan dikembangkan secara terprogram.

Akurasi dan Relevansi data pelaporan monitoring dan evaluasi yang berarti bahwa Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) harus dikelola berdasarkan data-data kegiatan yang valid dan proses transaksi keuangan yang akuntabel. Setiap operator SKPD yang melakukan kesalahan dalam entri data dapat melakukan edit/direvisi apabila data pelaporan monitoring dan evaluasi belum dilakukan pengesahan pada sistem, namun apabila sudah terlanjur dilakukan pengesahan pada sistem, maka operator SKPD harus menghubungi Kasubbag

Monitoring dan Evaluasi di Bagian Evaluasi Pembangunan sebagai pengelola sistem untuk melakukan revisi.

Dari beberapa hal tersebut diatas, tergambar sebuah keadaan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi yang dialami, dimana kesalahan dalam penginputan data yang keliru dapat diperbaiki. Nilai suatu informasi dapat ditentukan berdasarkan sifatnya. Salah satu sifat yang dapat menentukan nilai informasi adalah kemudahan. Kemudahan dalam memperoleh informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila dapat diperoleh secara mudah. Informasi yang penting dan sangat dibutuhkan menjadi tidak bernilai jika sulit diperoleh. Informasi dapat diperoleh dengan mudah jika sistem dilengkapi oleh basis data dan bagian pengolah yang mampu mengolah data dengan baik untuk memenuhi segala kebutuhan informasi secara mudah.

Menurut Davis (2002) nilai informasi dikatakan sempurna apabila perbedaan antara kebijakan optimal tanpa informasi yang sempurna dan kebijakan optimal menggunakan informasi yang sempurna dapat dinyatakan dengan jelas. Berdasarkan informasi-informasi itu, maka seseorang manajer/pimpinan dapat mengambil keputusan secara lebih baik.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia sangat penting bagi organisasi dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan tenaga kerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kualitas sumber daya manusia perlu dikelola secara efektif dan efisien agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dengan tuntutan dan kemampuan organisasi perusahaan. Dengan demikian organisasi pemerintah dapat berkembang secara produktif dan wajar.

Kualitas sumber daya manusia dimaksud adalah kualitas dari pengelola Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*), yakni operator dengan masa kerja, tingkat pendidikan dan pengalaman mengikuti diklat yang berbeda. Namun tidak lepas pula peranan operator SKPD yang melakukan administrasi pelaporan monitoring dan evaluasi.

Sistem monitoring dan evaluasi merupakan fungsi penting yang menjadi tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Fungsi utamanya adalah menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil pelaporan yang berupa realisasi pelaporan kegiatan SKPD serta mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi atau ada indikasi bermasalah dalam pelaksanaannya. Data tersebut digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan. Pengolahan data yang lambat dapat mengakibatkan lambatnya penyajian informasi sehingga dimungkinkan pula terjadi keterlambatan penyampaian laporan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa operator belum semuanya mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara maksimal, dimana masih banyak operator yang membidangi pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) belum mengikuti pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi yang sedang dilakukan.

Sarana dan Prasarana Penunjang Sistem Informasi

Pemerintah Kota Bontang telah membangun Kantor Pusat Pemerintahan baru di daerah Bontang Lestari, dimana daerah tersebut merupakan daerah pengembangan yang berada di luar pusat Kota Bontang, sehingga sarana dan prasarana terkait infrastruktur teknologi informasi yang mendukung Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (*e-Controlling*) belum sepenuhnya tersedia.

Dalam Pemanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang terdiri dari *software* dan *hardware*. Sarana dan prasaran *software* berupa Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) itu sendiri, koneksi internet dan beberapa aplikasi/anti virus dalam rangka keamanan informasi yang dibutuhkan dalam menjaga keamanan/*security* dari Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*). Sedangkan sarana dan prasarana *hardware* berupa perangkat server, PC, dan perangkat lainnya yang ditempatkan di *Network Operation Center* (NOC) yang merupakan pusat data dari Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*), dimana pengelolaan dari NOC ini menjadi tanggung jawab dari Bagian Evaluasi Pembangunan Pemerintah Kota Bontang.

Aplikasi atau Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi

Hal yang dimaksud dengan aplikasi atau Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) disini adalah Sistem Informasi yang merupakan sistem yang berfungsi untuk menghimpun, menganalisis dan menyusun pelaporan hasil evaluasi dan monitoring realisasi kegiatan SKPD serta mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi atau ada indikasi bermasalah dalam pelaksanaannya. Data tersebut digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta merumuskan pemecahan masalah terhadap hasil pelaksanaan pembangunan. Dengan berkembangnya teknologi komputer dan komunikasi suatu model komputer tunggal yang melayani seluruh tugas-tugas komputasi suatu organisasi kini telah diganti dengan sekumpulan komputer yang terpisah-pisah akan tetapi saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya.

Manfaat jaringan komputer bagi manusia dapat digunakan untuk jaringan untuk perusahaan, jaringan untuk umum, dan masalah sosial jaringan. terlebih untuk jaringan keuangan bagi pemerintah. Terlebih jika digunakan dalam sistem aplikasi yang dapat mendukung pelaksanaan proses monitoring dan evaluasi.

Untuk dapat lebih memaksimalkan dalam pemanfaatan aplikasi atau Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) dibutuhkannya sebuah integrasi sistem yang komprehensif, mulai dari sistem informasi penyusunan APBD, sistem informasi rencana pelaksanaan kegiatan, sistem informasi rencana penyerapan anggaran, sistem informasi rencana pemilihan penyedia barang/jasa, sistem informasi pengadaan barang/jasa, sistem informasi proses pencairan keuangan, sistem informasi pengukuran kinerja instansional yang meliputi, target dan realisasi serta ketepatan waktu dan efisiensi anggaran sehingga tidak ada informasi yang bersifat parsial, sehingga informasi yang dapat disajikan dapat bersifat *real time* dan akurat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka perencanaan pembangunan ditahun yang akan datang.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Efektivitas Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*)

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa beberapa faktor pendukung terhadap Efektivitas Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) antara lain :

- a) Peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah dan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang sangat jelas prosedur dan komponen yang termuat dalam tahapan pelaporan sehingga memudahkan dalam mengimplementasikan dan menyajikan laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan bersifat *real time*.
- b) Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) yang telah terkomputerisasi dapat memberikan jawaban atas efisiensi waktu dan tenaga.

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui selain beberapa faktor pendukung terhadap Efektivitas Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) diatas, terdapat faktor penghambat, antara lain :

- a) Kondisi tenaga listrik PLN di Kota Bontang yang masih sering mati dan kurang stabilnya layanan jasa internet sangat mempengaruhi kinerja Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*).
- b) Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kegiatan penyusunan pelaporan monitoring dan evaluasi, sehingga kinerja kualitas SDM maupun Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) tidak dapat terukur. Misalnya ketika batas akhir waktu pengentrian/penginputan data laporan, maka koordinator pelaporan pada setiap SKPD harus segera melakukan pengentrian/penginputan data pelaporan.
- c) Belum terintegrasinya Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) dengan beberapa sistem informasi lain yang dikelola oleh instansi / SKPD yang berbeda, akan tetapi saling beririsan terkait

penggunaan sumber datanya, antara lain Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMKUDA) dan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sehingga dalam pengelolaan data pelaporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan oleh pihak terkait masih sangat terbatas dan hanya menyediakan data-data pasif dan pengelolaannya belum dapat dilaksanakan dengan maksimal

- d) Lokasi Pusat Kantor Pemerintahan Kota Bontang merupakan daerah pengembangan yang berada di luar pusat Kota Bontang, sehingga sarana dan prasarana terkait infrastruktur teknologi informasi yang mendukung Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) belum sepenuhnya tersedia.

Kurangnya alokasi anggaran yang disediakan dalam pemenuhan pengadaan sarana dan prasana teknologi informasi dalam mendukung Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu dalam proses pelaporan monitoring dan evaluasi sangat tergantung terhadap faktor internal SKPD. Berdasarkan hasil penelitian, untuk dapat tepat waktu dalam proses penyusunan pelaporan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) memerlukan koordinasi yang baik antara Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai koordinator pelaporan SKPD dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara, sehingga data-data terkait realisasi atau permasalahan kegiatan SKPD tepat waktu untuk dapat di proses pengentrian/penginputan ke dalam Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*).
2. Dalam penelitian ini didapatkan data dan fakta bahwa setiap terjadi kesalahan dalam *penginputan* data dapat dilakukan perbaikan oleh operator sesuai kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan kualitas terhadap akurasi dan validitas data telah dilaksanakan.
3. Sistem monitoring dan evaluasi merupakan fungsi penting dan sangat tergantung terhadap kondisi kompetensi sumber daya manusia yang ada, meskipun belum seluruhnya pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam mengoperasikan Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*). Dalam penelitian ini didapatkan bahwa fungsi utama dari sistem informasi tersebut adalah menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil pelaporan yang berupa realisasi pelaporan kegiatan SKPD serta mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi atau ada indikasi bermasalah dalam pelaksanaannya, dimana data tersebut digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan.

4. Berdasarkan penelitian ini didapatkan bahwa dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang terdiri dari *software*, *hardware* prosedur, model manajemen, keputusan, serta sebuah terminal data. Dengan adanya dukungan dari teknologi informasi yang diimplementasikan dalam Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) yang terkomputerisasi sangat efektif apabila dibandingkan dengan sistem manual, akan tetapi kondisi kestabilan dari jaringan internet dan listrik PLN di Kota Bontang yang masih sering mengalami gangguan mengakibatkan sulitnya mendapatkan informasi monitoring dan evaluasi secara cepat dan *real time* jika sistem otomatis tidak berjalan yang diakibatkan karena *server down*.
5. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) telah dibangun sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini, sehingga seluruh komponen monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan/kegiatan tiap SKPD telah termuat di dalamnya, akan tetapi Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) belum terintegrasi dengan dengan beberapa sistem informasi lain yang dikelola oleh instansi / SKPD yang berbeda, akan tetapi sama dalam penggunaan sumber datanya, sehingga pelaporan yang dihasilkan akan lebih komprehensif.

Saran

Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan beberapa saran yang dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*). Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Keterlambatan dalam menghimpun capaian hasil kegiatan serta kelengkapan data pertanggung jawaban kegiatan dari masing-masing PPTK oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai koordinator pelaporan SKPD dapat diatasi dengan cara menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya terkait tahapan dan batas akhir penyampaian laporan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan SKPD pada setiap bulannya.
2. Untuk dapat menjamin akurasi dan relevansi dari data realisasi fisik dan keuangan yang dientry/input pada Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*), selain sudah terverifikasi oleh Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan SKPD dan sudah melalui proses rekonsiliasi dengan pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai koordinator pengelolaan keuangan tingkat kota, juga harus terintegrasi dengan data perencanaan pembangunan di Bappeda, sehingga data pelaporan yang dicapai serta data yang disajikan dalam pelaporan monitoring dan evaluasi selain bersifat *real time*, juga dapat dijadikan pedoman dalam mengevaluasi rencana pembangunan tahun berikutnya.
3. Dalam peranan kompetensi sumber daya manusia, sebaiknya Bagian Evaluasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang dan semua SKPD diharuskan

- meningkatkan kualitas sumber daya manusia/operator. Solusinya adalah dengan memberikan pendidikan/pelatihan dalam pengelolaan data/pelaporan monitoring dan evaluasi kegiatan serta kemampuan dalam mengoperasikan Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*).
4. Dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, mengingat Pemerintah Kota Bontang telah membangun Kantor Pusat Pemerintahan baru di daerah Bontang Lestari, dimana daerah tersebut merupakan daerah pengembangan yang berada di luar pusat Kota Bontang, sehingga sarana dan prasarana terkait infrastruktur teknologi informasi yang mendukung Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (*e-Controlling*) belum sepenuhnya tersedia sehingga perlu ditunjang oleh penganggaran yang cukup/memadai, sehingga dapat menjamin dalam pengadaan sarana dan prasarana terkait infrastruktur teknologi informasi yang dibutuhkan.
 5. Aplikasi/Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) kedepannya perlu dilakukan pengembangan/peningkatan sistem/database dalam rangka integrasi Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*e-Controlling*) dengan beberapa sistem informasi lain yang dikelola oleh instansi / SKPD yang berbeda, akan tetapi sama dalam penggunaan sumber datanya, sehingga pelaporan yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan hasil pelaporan yang dihasilkan dapat lebih banyak memuat informasi yang diperlukan serta dapat memuat lebih banyak komponen dalam monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perkembangan terkait regulasi yang ada.

Daftar Pustaka

- Anonim. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang *Organisasi Perangkat Daerah*.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.
- _____. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang *Perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan*.
- _____. Peraturan Walikota Bontang No. 11 tahun 2015 tentang *Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan*.
- _____. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.
- Davis. 2002. *Kerangka Dasar: Sistem Informasi Manajemen Bagian 1 Pengantar*. Jakarta: Seri Manajemen No. 90-A. Cetakan Kedua Belas.
- Jogiyanto. 1993. *Analisis dan Design Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.

- Siagian. 2001. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2005. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Steers. 2005. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2006. *Statika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno. 2006. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.